



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

TAHUN
2023



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)

Nomor : 000.7.2/2013/300.05

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia, taufik dan hidayahNya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat menyusun dan menyelesaikan Perubahan Renstra tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renstra ini merupakan kewajiban setiap OPD sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda memberikan pedoman bagi pimpinan, bidang dan staf untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yaitu “*Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban*” serta berupaya mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Dalam penyajian Perubahan Renstra ini tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda merupakan acuan dalam penyusunan Renja setiap tahunnya.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra ini harapan kami kritik ataupun saran merupakan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Samarinda, 31 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA,



SUCIPTO, S.Pd.M.Si.

NIP. 19670319 199702 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4. Tantangan dan Peluang, Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan Renstra Propinsi.....	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang, Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD	29
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Strategis memuat tujuan, isu strategis, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikasi program dan kegiatan serta pagu pendanaan indikatif.

Berkenaan dengan perubahan RPJMD Pemerintah Kota Samarinda yang termasuk bidang urusan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang kemudian ditetapkan menjadi tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (RENJA) yang disusun setiap tahun.



Secara umum RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 memuat : 1 visi, 5 misi dan 10 program. Substansi RPJMD telah dijabarkan ke dalam Rencana Strategis.

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD selama 3 tahun (Tahun 2021 s.d 2023), maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 terdapat kendala dalam mengimplementasikannya RPJMD Kota Samarinda. Kondisi ini disebabkan telah terjadinya berbagai faktor baik dari aspek regulasi maupun kondisi sosial ekonomi terkini sebagai dampak dari Pandemi Covid 19 dan Perubahan SOTK yang turut mendorong perlunya penyesuaian sebagaimana yang akan direncanakan dalam Penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan maka *Dokumen Renstra ini berfungsi* sebagai pedoman Perencanaan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Umum dibidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang waktu ke depan. Proses penyusunan Perubahan Renstra 2021 – 2026 berdasarkan Perubahan RPJMD Kota melalui melalui Forum Renstra yang melibatkan stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Unsur Kecamatan dan Organisasi Kemasyarakatan serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. *Perubahan Renstra* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang *memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan* yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026. *Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan* penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kota Samarinda dengan ruang lingkup OPD, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya *ditetapkan* sebagai *Rencana Kinerja*



Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu pertanggungjawaban Instansi Pemerintah, Renstra ini digunakan sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Faktor-faktor yang turut mendorong perlunya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026 :

- a. Pandemi Covid 19 yang berdampak ke seluruh aspek kehidupan, menurunnya PAD Kota Samarinda,
- b. Regulasi peraturan perundangan-undangan terkait pembangunan : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;dan
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang – Undang RI Nomor 02 Tahun 2011, Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Partai Politik;
4. Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang orang/lembaga asing yang ada di Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah, Nomor 05 Tahun 2009, Tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;



13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
15. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 86 Tahun 2007, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
20. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008, Nomor: Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, Tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Penerimaan dan Pemberian bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Kepmendagri 1317 2023 Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 nomenklatur program kegiatan per 23 Juni 2023;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
36. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah No 2 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 tanggal 5 Juli Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;



41. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
42. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
43. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
44. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 tanggal 7 Juli Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
45. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 tanggal 31 Juli Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Perencanaan Strategik (Perubahan RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung upaya pencapaian arah serta kebijakan lainnya serta tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
2. Tersusunnya sasaran dan program yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan serta pelaksanaan tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk lima tahun mendatang.
3. Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
4. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri 6 (enam) bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Perubahan RENSTRA dengan dokumen perencanaan lainnya, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat informasi tentang peran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, telaahan rencana tata ruang, wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD serta penentuan isu-isu strategis dari tiap bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Berisi tentang strategi dan arah kebijakan 5 tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menyelenggarakan kegiatan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan teknis propinsi

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala



Daerah dan Legislatif.

- c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

a. Kepala Badan

membawahi :

- 1) Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- 2) Jafung Perencana Ahli Muda
- 3) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Ideologi
- 4) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Wawasan Kebangsaan
- 5) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik
- 6) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu
- 7) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Seni dan Budaya
- 8) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
- 9) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing
- 10) Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda Penanganan Konflik

b. Sekretaris

membawahi :

- 1) Subbag Umum dan Kepegawaian



- c. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
- e. Kepala Bidang Politik Ketahanan Seni, Budaya, Agama
Kemasyarakatan dan Ekonomi
- f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda berdasarkan data Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2022, memiliki jumlah pegawai sebanyak 78 orang, yang terdiri dari 43 orang PNS, 15 orang PTTB, dan 20 orang PTTH. Untuk mengetahui gambaran umum komposisi aparatur adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS	CPNS	PTTB	PTTH	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	-	-	-	-	-	0
2.	SLTP	1	-	-	-	1	1
3.	SLTA	18	-	6	11	36	36
4.	D.I	-	-	-	-	-	0
5.	D.II	-	-	-	-	-	0
6.	D.III	2	-	-	-	2	2
7.	Sarjana (S1)	13	-	9	9	28	28
8.	Pasca Sarjana (S2)	9	-	-	-	9	9
	Jumlah	43	-	15	20	76	76

Sumber data : Umum dan Kepegawaian



2. Pegawai Berdasarkan Golongan

3. No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	I	-	-
2.	II	18	17
3.	III	19	21
4.	IV	6	7
	Jumlah	43	43

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

4. Pembagian tugas

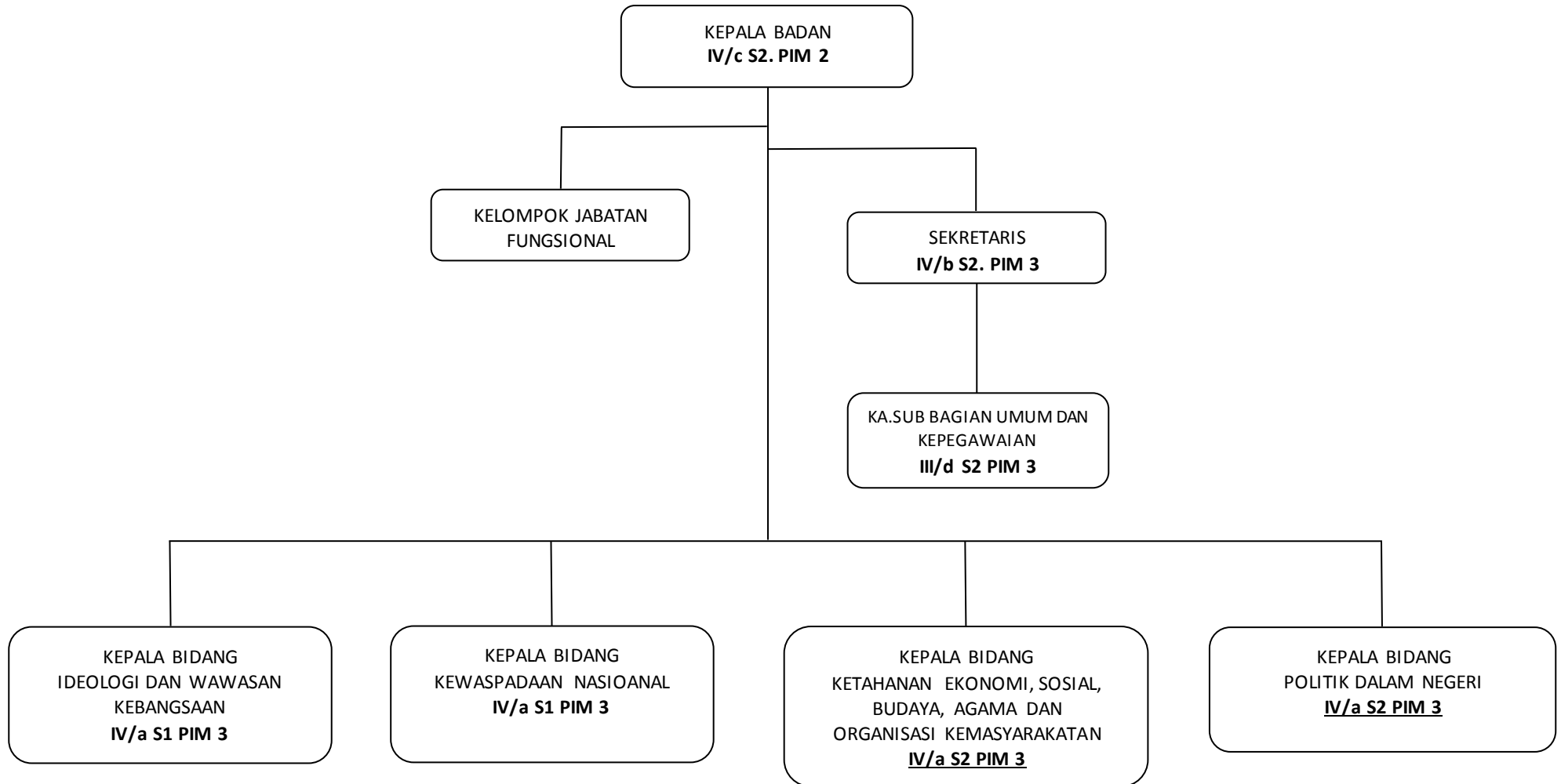
Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda membagi tugasnya kepada stafnya yang terdiri dari:

1. Kepala Badan (Kaban) : 1 orang
 2. Sekretaris : 1 orang
 3. Kepala Bidang (Kabid) : 4 orang
 4. Kepala Sub Bagian (Kasubbag) : 1 orang
 5. Jabatan Fungsional : 8 orang
 6. Staf PNS : 28 orang
 7. PTTB : 15 orang
 8. PTTH : 20 orang
- JUMLAH : 78 orang**

Struktur Organisasi Terlampir

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA





2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan kinerja pelayanan OPD, hasil yang dicapai pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Termonitornya kasus unjuk rasa dan kerawanan konflik sosial masyarakat.
2. Tersedianya data / peta potensi rawan konflik di masyarakat.
3. Terkoordinasinya instansi terkait dengan pihak keamanan.
4. Tersedianya data perkembangan politik daerah.

Sedangkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicapai pada tahun 2023 sebagai berikut :

- 1 Untuk tahun 2023 pencapaian kinerja pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dapat dicapai 94,17%.

Juga pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dapat dicapai 92,12%

- 2 Untuk tahun 2023 pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi



Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah dapat dicapai 100%.

- 3 Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dapat dicapai 96,05%.

Juga pada Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dapat dicapai 97,76%.

- 3 Untuk tahun 2023 pencapaian kinerja pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tercapai 96,73% karena minimnya dana APBD.

Juga pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dapat dicapai 84,73%

- 4 Untuk tahun 2023 pencapaian kinerja pada Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya pada kegiatan



Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dapat dicapai 96,85%

Juga pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dapat dicapai 93,90%

- 5 Untuk tahun 2023 pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dapat dicapai 93,55%

Juga pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dapat dicapai 99,79%

Dan pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bidang dapat dicapai 10,98%

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 S/D 2026

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan																		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1500 orang		894	700	1200	800	900	894	700	1200	800	900	894	700	1200	800	900
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		12 Laporan		3	12	8	8	8	3	12	8	8	8	3	12	8	8	8
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		Dokumen		-	-	4	4	5	-	-	4	4	5	-	-	4	4	5
	Jumlah Paskibraka		Orang		-	-	300	300	300	-	-	300	300	300	-	-	300	300	300
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.		Orang		-	-	44	40	80	-	-	44	40	80	-	-	44	40	80

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri																		
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		10 Dok.		0	10	10	10	10	0	10	10	10	10	0	10	10	10	10
	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		4000 Orang		1125	2450	10000	2500	2500	1125	2450	10000	2500	2500	1125	2450	10000	2500	2500

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		4 Laporan		200	12	12	12	12	200	12	12	12	12	200	12	12	12	12
3.	Bidang Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi																		
	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		0 Orang		300	600	600	600	750	300	600	600	600	750	300	600	600	600	750
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		25 Laporan		3	50	25	14	15	3	50	25	14	15	3	50	25	14	15

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		760 Orang		325	600	600	650	630	325	600	600	650	630	325	600	600	650	630
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		12 Laporan		3	20	25	27	30	3	20	25	27	30	3	20	25	27	30
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional																		
	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		750 Orang		300	750	1000	850	950	300	750	1000	850	950	300	750	1000	850	950

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		12 Laporan		23	14	14	14	14	23	14	14	14	14	23	14	14	14	14
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		12 Dok		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

TABEL. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Uraian Bidang Kesatuan Bangsa	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		Catatan
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan																		
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,038,464,000	1,498,706,000	506.090,000	499,272,700	501,550,881	1,026,748,912	1,411,386,391	0	0	0	98.87	94.17	0	0	0	4,044,083,581	60.29	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	105,274,000	78,466,500	212,180,000	218,545,400	225,101,762	104,365,800	72,281,500	0	0	0	99.14	92.12	0	0	0	839,567,662	21.04	
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-	-	1,800,000,000	1,810,000,000	1,811,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Paskibraka	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri																		
Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0	30,889,546,145	2,115,145,335	2,115,145,335	2,115,145,335	0	30,889,544,945	0	0	0	0	0	0	0	0	37,234,982,150	0	
Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2,923,325,335	7,225,184,000	2,332,542,836	2,402,519,121	2,474,594,695	2,917,105,259	6,939,915,843	0	0	0	99.79	96.05	0	0	0	17,358,165,987	56.79	

Uraian Bidang Kesatuan Bangsa	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata		Catatan
	Pada Tahun Ke-					Pada Tahun Ke-					Pada Tahun Ke-					Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	124,490,000	1,356,614,000	106,090,000	109,272,700	112,550,881	124,427,505	1,326,182,800	0	0	0	99.95	97.76	0	0	0	1,809,017,581	80.19	
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan Dan Ekonomi																		
Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	69,567,000	275,000,000	42,436,000	43,709,080	45,020,352	69,567,000	266,007,100	0	0	0	100	96.73	0	0	0	475,732,432	70.54	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34,139,000	275,000,000	42,436,000	43,709,080	45,020,352	34,138,000	233,001,750	0	0	0	100	84.73	0	0	0	440,304,432	60.67	
Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	251,130,000	407,091,000	238,702,500	245,863,575	253,239,482	238,910,800	394,264,400	0	0	0	95.13	96.85	0	0	0	1,396,026,557	45.36	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	472,122,000	1,500,000,000	238,702,500	245,863,575	253,239,482	443,041,999	1,408,535,259	0	0	0	93.84	93.90	0	0	0	2,709,927,557	68.33	
Bidang Kewaspadaan Nasional																		
Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	257,599,000	961,037,500	265,225,000	273,181,750	281,377,203	256,534,014	899,066,694	0	0	0	99.59	93.55	0	0	0	2,038,420,453	56.69	

Uraian Bidang Kesatuan Bangsa	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		Catatan
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	165,162,000	175,000,000	106,090,000	109,272,700	112,550,881	164,262,000	174,639,750	0	0	0	99.46	99.79	0	0	0	668,075,581	50.73	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4,988,602,000	11,830,906,000	397,540,448	409,466,661	421,750,661	4,381,254,908	1,298,720,260	0	0	0	87.83	10.98	0	0	0	18,048,265,770	31.47	



2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, perlu adanya identifikasi factor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Kekuatan

- a) Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- b) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- e) Adanya sarana dan prasarana yang cukup

2) Kelemahan

- a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan OPD
- c) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bias dilaksanakan secara maksimal.

**b. Faktor Eksternal**

- 1) Peluang
 - a) Stabilitas daerah yang cukup kondusif
 - b) Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
 - c) Banyaknya organisasi di masyarakat
 - d) Kerjasama yang baik antar instansi vertikal
 - e) Tersedianya pedoman untuk acuan
- 2) Ancaman
 - a) Adanya potensi terjadinya konflik
 - b) Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada
 - c) Kenakalan remaja dan Narkoba

2.4.2. Faktor-faktor kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan factor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Samarinda tetap kondusif
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal
- e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertical maupun horizontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD yaitu :

Masih Kurangnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan. Permendagri Nomor 71 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang selama ini diselenggarakan bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan untuk mencegah tantangan dan ancaman yang akan mengganggu keutuhan NKRI serta untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI.

Saat ini terutama generasi muda sangat mudah terpengaruh oleh modernisasi dan perkembangan teknologi informasi yang dapat memberikan pengaruh negatif seperti penyalahgunaan narkoba, perkuliahan antar pelajar dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya.

Untuk menangkal hal tersebut diatas diperlukan adanya pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan.

Faktor-faktor permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum semua masyarakat memahami dan mengamalkan ideologi Pancasila dan berwawasan Kebangsaan yang baik.	Belum optimalnya peran ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Partai politik dalam membantu memberikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.	Kurang nya dana dalam menunjang kegiatan ormas LSM , Lembaga Pendidikan dan lembaga keagamaan yang membantu memberikan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara



3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Agar cara pandang jauh kedepan dan apa yang akan dicapai dapat eksis, anti sipasi, dan inovatif maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban”.

Dan untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Misi antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Berdasarkan Misi tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mengemban Misi ke 3 (tiga) yaitu ***“Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”*** serta mendukung terwujudnya Misi yang ke 5 (lima) yaitu ***“Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari”***

Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program *smart city* plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita



7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (*star up*)

Berdasarkan program prioritas tersebut diatas akan didukung oleh program yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga Dan Renstra

Analisis Rencana Kerja Kementrian / Lembaga dan OPD Pemerintah Kota yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi dan Sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Kerja OPD Pemerintah Kota terhadap sasaran Rencana Kerja Kementrian / Lembaga dan OPD Pemerintah Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing– masing OPD.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terkait dengan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan OPD Pemerintah Kota yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Timur.

Korelasi dengan kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka



Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
6. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu :

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
2. Ekonomi.
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),
4. Politik.
5. Pertahanan dan Keamanan.
6. Hukum dan Aparatur.
7. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Pemerintah telah menyusun RPJMN 2019-2024 dengan mengangkat Visi ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***. Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia Maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.



Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sedangkan 5 prioritas pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia;
2. Peningkatan Infrastruktur strategis;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi;

Sesuai tugas dan fungsinya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

Sedangkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Ada 5 (lima) Program yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik



3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RT/RW dan KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian.

Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya.

Dengan prediksi Kota Samarinda akan berjumlah penduduk 872.768 jiwa (menjadi Kota Metropolitan karena diatas 1 juta penduduk) di tahun 2019 dan 1.388.466 jiwa di tahun 2023, membawa tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan penduduk akan lahan yang hanya tersedia 718 Km². Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

**Distribusi penduduk wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2033**

No	Kecamatan	Jumlah 2013	Rencana Distribusi Penduduk	
			2017	2033
1	Palaran	54.353	71.352	93.668
2	Samarinda ilir	73.383	96.334	126.463
3	Sambutan	48.342	63.461	83.309
4	Samarinda Kota	36.604	48.052	63.081
5	Samarinda Seberang	63.715	83.642	109.802
6	Loa Janan Ilir	62.740	82.362	108.122
7	Sungai Kunjang	126.302	165.804	217.660
8	Samarinda Ulu	111.34.659	176.775	232.062
9	Sungai Pinang	105.695	138.752	182.148
10	Samarinda Utara	99.894	131.137	172.150
Jumlah		805.687	1.057.671	1.388.466

Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Untuk merealisasikan program-program pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan yang sesuai dengan program pemerintah Kota Samarinda yang ada pada program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

1. Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik

Terkait isu strategis dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan ekosistem yang ada di sungai Mahakam seperti berkurangnya jumlah ikan pesut khas Samarinda.
2. Rusaknya kawasan hutan akibat penebangan liar dan penambangan batu bara.
3. Bencana banjir, tanah longsor, kemarau yang cukup meningkat.
4. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri ataupun limbah rumah tangga.
5. Minimnya Ruang Tata Terbuka Hijau (RTH)



Untuk mengantisipasi dampak KLHS tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meningkatkan pembinaan dan partisipasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang ada.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Penyelenggaraan PEMILU serentak tahun 2024.
2. Maraknya paham/Ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila sebagai akibat akses informasi yang bebas.
3. Paham radikalisme dan terorisme.
4. Konflik sosial.
5. Penyalahgunaan narkoba.

Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila dan peningkatan kesadaran bela negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pemahaman-pemahaman tentang pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan di Implementasikan dalam kehidupan sehari-hari guna menangkal modernisasi dan globalisasi melalui informasi-informasi bebas yang dapat mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

a) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai visi dan misi untuk kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah :

1. Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
2. Terciptanya Pelayanan Prima bagi masyarakat

b) Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sasaran strategi dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

c) Indikator Sasaran

Sedangkan Indikator Sasaran dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat
2. Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik
3. Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang diberdayakan



4. Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan
5. Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti
6. Nilai IKM

Berikut Tujuan dan Sasaran ada pada Tabel 4.1

TABEL. 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
						1	2	3	4	5
1	2	3		4		5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	Presentase jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan		Persen	20,83	25	29,17	33,33	41,67
				Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	Persen	20,83	25	29,17	33,33	41,67
				Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	Persen	100	100	100	100	100
				Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	Persen	13,41	14,63	15,85	17,07	20,73
				Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	Persen	30	35	40	45	45
				Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	Persen	20	20	20	20	20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas dalam tahun 2021 – 2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah ;

1. Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki Wawasan dan Karakter Kebangsaan
2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik

5.2. Arah Kebijakan

Adapun kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2021 – 2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah ;

1. Revolusi mental

Instruksi Presiden nomor 16 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan ditetapkan tanggal 6 Desember 2016. Revolusi Mental merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan memperkuat peran nyata penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat mencakup norma, perilaku serta aspek budaya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melalui bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ORMAS dan seluruh elemen masyarakat Kota Samarinda. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk kembali membangkitkan semangat perubahan kemajuan bangsa, berdaulat dalam politik, ekonomi dan sosial budaya.

2. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah seperti :

1. Revitalisasi, Restrukturisasi dan Deregulasi pelayanan publik
2. Peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik
3. Korporatisasi Unit pelayanan publik

Badan Kesatuan Bangsa sebagai instansi teknis melalui peran dan kemampuannya menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan baik dalam respon berbagai permasalahan maupun dalam perbaikan pelayanan terhadap masyarakat seperti pengurusan ijin atau rekomendasi organisasi masyarakat (Ormas), OKP, LSM, Paguyuban dan Yayasan, rekomendasi ijin keramaian, rekomendasi ijin penelitian dan rekomendasi bantuan keuangan Partai Politik (Parpol)

Tabel. 26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : <i>Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban</i>				RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026
Misi : <i>Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat</i>				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan pemahaman ideologi Pancasila sebagai karakter kebangsaan bangsa, Politik, sosial budaya dan keagamaan serta Penguatan Konflik social	Peningkatan Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program dan kegiatan Tahun 2021-2026 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai berikut :

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,



Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Subkeg. Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
- Subkeg. Pembentukan Paskibraka
- Subkeg. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Subkeg. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang /Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Subkeg. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - Subkeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
 - Subkeg. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan



- Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD
- Subkeg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Subkeg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkeg. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Subkeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2. Pendanaan Indikatif

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Samarinda, pada tahun anggaran 2021 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda telah menyusun anggaran seperti pada tabel berikut :

TABEL. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terciptanya Pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan SKPD	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	76,4 nilai	76,5 nilai	13,029,500,000	76,6 nilai	14,989,594,000	76,7 nilai	10,170,130,856	76,8 nilai	10,616,745,614	76,9 nilai	11,926,745,614	80 nilai	60,732,716,084	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Samarinda	
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,1 nilai	80,2 nilai	100,000,000	80,3 nilai	100,000,000	80,4 nilai	200,000,000	80,5 nilai	200,000,000	80,6 nilai	200,000,000	80,7 nilai	800,000,000			
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	5 dokumen	50,000,000	5 dokumen	50,000,000	5 dokumen	100,000,000	5 dokumen	100,000,000	5 dokumen	100,000,000	25 dokumen	400,000,000			
		8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5 dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000	5 dokumen	210,000,000			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 laporan	4 laporan	20,000,000	1 laporan	20,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	8 laporan	190,000,000			
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	7 Laporan	11,050,000,000	12 Laporan	11,150,000,000	12 Laporan	7,287,605,266	12 Laporan	8,065,320,024	12 Laporan	9,365,320,024	67 Laporan	46,918,245,314			
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/ bulan	65 orang/ bulan	10,000,000,000	65 orang/ bulan	10,000,000,000	65 orang/ bulan	6,215,320,024	65 orang/ bulan	6,515,320,024	65 orang/ bulan	7,515,320,024	325 orang/bulan	40,245,960,072			
		8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	40 dokumen	1,000,000,000	40 dokumen	1,100,000,000	40 dokumen	1,022,285,242	40 dokumen	1,500,000,000	40 dokumen	1,800,000,000	200 dokumen	6,422,285,242			
		8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	1 Laporan	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	5 Laporan	50,000,000	25 Laporan	250,000,000			
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	105 orang	105 orang	50,000,000	105 orang	210,000,000	105 orang	230,000,000	105 orang	240,000,000	105 orang	250,000,000	525 Orang	980,000,000			
		8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80 stel	90 stel	50,000,000	90 stel	50,000,000	100 stel	60,000,000	100 stel	60,000,000	110 stel	60,000,000	490 stel	280,000,000			
		8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	-	-	20 orang	160,000,000	20 orang	170,000,000	20 orang	180,000,000	20 orang	190,000,000	80 orang	700,000,000			
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	12 Laporan	12 Laporan	417,000,000	12 Laporan	440,000,000	12 Laporan	481,030,840	12 Laporan	481,030,840	12 Laporan	481,030,840	60 Laporan	2,300,092,520			
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	7,500,000	12 paket	7,500,000	12 paket	5,999,100	12 paket	5,999,100	12 paket	5,999,100	60 paket	32,997,300			
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	150,000,000	12 paket	150,000,000	12 paket	200,000,000	12 paket	200,000,000	12 paket	200,000,000	60 paket	900,000,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 laporan	5 laporan	17,500,000	5 laporan	17,500,000	5 laporan	24,651,000	5 laporan	24,651,000	5 laporan	24,651,000	25 Laporan	108,953,000			
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	30,000,000	12 paket	30,000,000	12 paket	42,999,740	12 paket	42,999,740	12 paket	42,999,740	60 paket	188,999,220			
		8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan, minum tamu, snack tamu, cinderamata	4 laporan	4 laporan	12,000,000	4 laporan	35,000,000	1 laporan	12,000,000	4 laporan	12,000,000	4 laporan	12,000,000	20 laporan	83,000,000			
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	195,381,000	12 Laporan	195,381,000	12 Laporan	195,381,000	60 laporan	986,143,000			
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	-	-	-	5 Laporan	1,572,094,000	3 Laporan	405,124,000	2 Laporan	63,124,000	2 Laporan	63,124,000	12 Laporan	2,103,466,000			
		8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	-	3 Unit	586,874,000	2 Unit	63,124,000	2 Unit	63,124,000	2 Unit	63,124,000	9 unit	776,246,000			
		8.01.01.2.08.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	2 unit	985,220,000	1 unit	342,000,000	0	-	0	-	3 unit	1,327,220,000			
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	1,285,000,000	12 Laporan	1,385,000,000	12 Laporan	1,468,170,000	12 Laporan	1,469,070,000	12 Laporan	1,469,070,000	60 Laporan	7,076,310,000			
		8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,000,000	60 Laporan	100,000,000			
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan	45,000,000	36 laporan	45,000,000	30 laporan	30,000,000	36 laporan	30,900,000	36 laporan	30,900,000	180 Laporan	181,800,000			
		8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,200,000,000	12 Laporan	1,300,000,000	12 Laporan	1,400,000,000	12 Laporan	1,400,000,000	12 Laporan	1,400,000,000	60 Laporan	6,700,000,000			
		8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 laporan	10 laporan	20,000,000	10 laporan	20,000,000	10 laporan	18,170,000	10 laporan	18,170,000	10 laporan	18,170,000	50 laporan	94,510,000			
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	12 Laporan	127,500,000	12 Laporan	132,500,000	12 Laporan	98,200,750	12 Laporan	98,200,750	12 Laporan	98,200,750	60 Laporan	554,602,250			
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	60,000,000	18 Unit	65,000,000	18 Unit	44,706,750	18 Unit	44,706,750	18 Unit	44,706,750	90 Unit	259,120,250			
		8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	7,500,000	12 Unit	7,500,000	12 Unit	25,000,000	12 Unit	25,000,000	12 Unit	25,000,000	60 Unit	90,000,000			
		8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60,000,000	1 Unit	60,000,000	1 Unit	28,494,000	1 Unit	28,494,000	1 Unit	28,494,000	5 Unit	205,482,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Keangsaan	Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	9.33	20.83%	300,000,000	25.00%	309,000,000	29.17%	2,718,270,000	33.33%	3,250,000,000	41.67%	3,700,000,000	150%	10,277,270,000	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Samarinda	
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	500 orang	300,000,000	700 orang	309,000,000	1000 orang	2,718,270,000	1200 orang	3,250,000,000	1500 orang	3,700,000,000	4900 orang	10,277,270,000			
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 orang	894 orang	100,000,000	700 orang	103,000,000	1200 orang	506,090,000	800 orang	600,000,000	900 orang	700,000,000	4494 orang	2,009,090,000			
		8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 laporan	3 laporan	200,000,000	12 Laporan	206,000,000	8 Laporan	112,180,000	8 Laporan	150,000,000	8 Laporan	200,000,000	39 laporan	868,180,000			
		8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-	-	-	-	-	4 Dokumen	1,800,000,000	4 Dokumen	2,000,000,000	5 Dokumen	2,100,000,000	13 Dokumen	5,900,000,000			
		8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	-	-	-	-	300 Orang	200,000,000	300 Orang	300,000,000	300 Orang	400,000,000	900 Orang	900,000,000			
		8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	-	-	-	-	-	44 Orang	100,000,000	40 Orang	200,000,000	80 Orang	300,000,000	164 Orang	600,000,000			
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	4%	100%	2,298,645,335	100%	62,258,405,664	100%	53,943,679,550	100%	6,102,519,121	100%	6,224,594,695	500%	130,827,844,365	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Samarinda	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	1100 orang	2,298,645,335	3800 orang	62,258,405,664	1000 orang	53,943,679,550	1200 orang	6,102,519,121	1200 orang	6,224,594,695	8,300 orang	130,827,844,365			
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	-	-	10 dokumen	56,568,106,050	10 dokumen	50,913,097,550	10 dokumen	2,200,000,000	10 dokumen	2,250,000,000	40 dokumen	111,931,203,600			
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4000 orang	1125 orang	2,198,645,335	2450 orang	4,332,329,000	10000 orang	1,517,874,000	2500 orang	2,402,519,121	2500 orang	2,474,594,695	18575 orang	12,925,962,151			
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan	200 laporan	100,000,000	12 Laporan	1,357,970,614	12 Laporan	1,512,708,000	12 Laporan	1,500,000,000	12 Laporan	1,500,000,000	248 laporan	5,970,678,614			
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	18.29	13.41	80,000,000	14.63	82,400,000	15.85	345,000,000	17.07	450,000,000	20.73	580,000,000	81.71	1,537,400,000	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Samarinda	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	15 Ormas	11 Ormas	80,000,000	12 Ormas	82,400,000	13 Ormas	345,000,000	14 Ormas	450,000,000	17 Ormas	580,000,000	67 Ormas	1,537,400,000			
		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	300 orang	40,000,000	600 orang	41,200,000	600 orang	220,000,000	600 orang	200,000,000	750 orang	300,000,000	2850 orang	801,200,000			
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 laporan	3 laporan	40,000,000	50 laporan	41,200,000	25 laporan	125,000,000	14 laporan	250,000,000	15 laporan	280,000,000	128 laporan	736,200,000			
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	6.45%	30	450,000,000	35	463,500,000	40	1,283,500,000	45	1,500,000,000	45	1,850,000,000	195	5,547,000,000	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Samarinda	
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	30 Laporan	450,000,000	35 Laporan	463,500,000	40 Laporan	1,283,500,000	45 Laporan	1,500,000,000	45 Laporan	1,850,000,000	195 Laporan	5,547,000,000			
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	760 orang	325 orang	225,000,000	600 orang	231,750,000	600 orang	263,500,000	650 orang	300,000,000	630 orang	350,000,000	2805 orang	1,370,250,000			
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	3 laporan	225,000,000	20 laporan	231,750,000	25 laporan	1,020,000,000	27 laporan	1,200,000,000	30 laporan	1,500,000,000	105 laporan	4,176,750,000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Catatan
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	7,34%	20	724,720,000	20	746,461,600	20	668,855,448	20	2,700,000,000	20	3,150,000,000	100	7,990,037,048	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Samarinda	
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	20 kasus	24 kasus	724,720,000	24 kasus	746,461,600	24 kasus	668,855,448	24 kasus	2,700,000,000	24 kasus	3,150,000,000	120 kasus	7,990,037,048			
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	750 orang	300 orang	250,000,000	750 orang	257,500,000	1000 orang	265,225,000	850 orang	600,000,000	950 orang	750,000,000	3850 orang	2,122,725,000			
		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	23 laporan	100,000,000	14 laporan	103,000,000	14 laporan	106,090,000	14 laporan	250,000,000	14 laporan	400,000,000	79 laporan	959,090,000			
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12 dokumen	12 dokumen	374,720,000	12 dokumen	385,961,600	12 dokumen	297,540,448	12 dokumen	1,850,000,000	12 dokumen	2,000,000,000	60 dokumen	4,908,222,048			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Penyelenggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

TABEL. 28.
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Samarinda
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 2021	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah masyarakat yang sudah diberikan pemahaman mengenai Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	1500 Orang	894 Orang	700 Orang	1075 Orang	1300 Orang	1400 Orang	100%
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	0	10 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	80%%
	Jumlah TIM Monitoring Perkembangan Politik Daerah	81 Orang	81 Orang	81 Orang	32 Orang	32 Orang	32 Orang	100%
3	Jumlah Pembinaan Anggota ORMAS	100 Orang	125 Orang	150 Orang	175 Orang	200 Orang	225 Orang	100%
4	Kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
5	Jumlah Konflik sosial di masyarakat	-	-	-	50 Kasus	45 Kasus	40 Kasus	60%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan RPJMD Pemerintah Kota Samarinda. Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Dokumen Renstra disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen perubahan RPJMD tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan mengacu pada yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD

Akhirnya Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis. Perubahan Renstra ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA,**



SUCIPTO, S.Pd, M.Si.
NIP. 19670319 199702 1 003